



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET

Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023

AUDITED



www.setkab.go.id



JL. VETERAN NO 17-18



JAKARTA PUSAT



BAGIAN ANGGARAN 114



SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KEUANGAN **Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 (*Audited*)**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (Setkab), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Setkab bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai, untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Setkab untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Setkab. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Setkab, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 41b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hanif Mohamad Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE, CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 10458



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Kabinet adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Kabinet. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 April 2024

Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional.....	42
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	50
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	60



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT KABINET
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(UNAUDITED)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 (*Unaudited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 4 Februari 2024
Inspektur Sekretariat Kabinet,

Muharnad Irwandi
NIP. 196805281989031001



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 April 2024
Sekretaris Kabinet,



Pramono Anung



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023..... 3
Tabel 2	Neraca per 31 Desember 2023..... 4
Tabel 3	Laporan Operasional per 31 Desember 2023..... 5
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023..... 6
Tabel 5	Kriteria Kualitas Piutang..... 17
Tabel 6	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap..... 19
Tabel 7	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud..... 20
Tabel 8	Rincian Belanja <i>Automatic Adjustment</i> , Penambahan Anggaran, Realokasi Anggaran, Buka Blokir dan Revisi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023..... 23
Tabel 9	Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023..... 24
Tabel 10	Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja..... 25
Tabel 11	Pagu Anggaran Berdasarkan Program..... 25
Tabel 12	Realisasi Pendapatan PNBPN Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022..... 26
Tabel 13	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023..... 28
Tabel 14	Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2023..... 28
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Berdasarkan Jenis Belanja untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022..... 29
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022..... 31
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022..... 32
Tabel 18	Realisasi Belanja Barang (Akun COVID-19) untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023..... 33
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022..... 34
Tabel 20	Capaian Output Per 31 Desember 2023..... 35



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel 21	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2023 dan 2022.....	38
Tabel 22	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023	39
Tabel 23	Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	40
Tabel 24	Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023.....	41
Tabel 25	Rincian Pembelian, Pengembangan dan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023.....	41
Tabel 26	Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023.....	42
Tabel 27	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023...	43
Tabel 28	Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2023	43
Tabel 29	Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2023	44
Tabel 30	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023.....	44
Tabel 31	Mutasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2023.....	45
Tabel 32	Rincian Pembelian dan Pengembangan Aset Tidak Berwujud s.d. 31 Desember 2023.....	45
Tabel 33	Rincian Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023.....	47
Tabel 34	Mutasi Aset Lain-Lain s.d. 31 Desember 2023.....	47
Tabel 35	Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023.....	48
Tabel 36	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2023.....	49
Tabel 37	Rincian Utang Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023	50
Tabel 38	Realisasi Beban dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023.....	52
Tabel 39	Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	53
Tabel 40	Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	53
Tabel 41	Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	54



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Tabel 42	Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	55
Tabel 43	Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	55
Tabel 44	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	56
Tabel 45	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022.....	56
Tabel 46	Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	57
Tabel 47	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	61
Tabel 48	Rincian BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023.....	62
Tabel 49	Rincian Surat Ralat SPM Akun Penanganan Pandemi COVID-19.....	64
Tabel 50	Tabel Rekening dan <i>Virtual Account</i> Sekretariat Kabinet Tahun 2023.....	65



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto pada Tahun 2023	28

Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp940.501.269 dan telah disetor ke Kas Negara. Tahun anggaran 2023 Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi pendapatan, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya pada Sekretariat Kabinet antara lain berasal dari Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp350.586.033.180 atau mencapai 98,31 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp356.605.412.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per tanggal 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.647.410.384 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.316.789.784; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.294.454.156; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13.036.166.444. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp13.297.553.962 dan Rp16.349.856.422.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp345.938.107.947 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp345.938.107.947. Pendapatan dan Beban dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp770.286.350 dan Rp2.000.000. Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp351.312.348 dan Rp231.902.308. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa adalah masing-masing sebesar Rp887.696.390 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp345.050.411.557.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp11.754.718.568 dan perubahan ekuitas yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah naik sebesar Rp4.595.137.854 sehingga nilai ekuitas akhir adalah Rp16.349.856.422. Perubahan ekuitas tersebut berasal dari selisih antara Defisit Laporan Operasional sebesar Rp345.050.411.557 ditambah dengan Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp17.500 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp349.645.531.911.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT KABINET LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023		% thd Anggaran	2022
		Anggaran	Realisasi (Neto)		Realisasi (Neto)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	-	940.501.269	-	1.702.967.941
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		-	940.501.269	0,00	1.702.967.941
B. BELANJA NEGARA	B.2.				
Belanja Pemerintah Pusat					
Belanja Pegawai	B.3	222.410.676.000	220.250.526.817	99,03	181.769.542.466
Belanja Barang	B.4	120.393.984.000	116.659.788.242	96,90	112.116.917.164
Belanja Modal	B.5	13.800.752.000	13.675.718.121	99,09	1.752.855.250
JUMLAH BELANJA NEGARA		356.605.412.000	350.586.033.180	98,31	295.639.314.880

Jakarta, 30 April 2024

Sekretaris Kabinet,



**SEKRETARIAT KABINET
NERACA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	800.803.521	683.175.177
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	659.252.775	1.123.663.654
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	8.308.578
Piutang Bukan Pajak (Neto)		-	8.308.578
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.4	-	3.499.993
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.5	-	(17.500)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Neto)		-	3.482.493
Persediaan	C.6	2.856.733.488	2.262.426.763
Jumlah Aset Lancar		4.316.789.784	4.081.056.665
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.7	57.720.649.541	56.954.604.053
Aset Tetap Lainnya	C.8	1.560.950.119	1.331.598.523
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(46.987.145.504)	(44.499.422.683)
Jumlah Aset Tetap		12.294.454.156	13.786.779.893
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.10	13.793.914.807	4.632.211.682
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.11	5.699.184.710	
Aset Lain-Lain	C.12	-	339.889.204
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(6.456.933.073)	(4.111.765.035)
Jumlah Aset Lainnya		13.036.166.444	860.335.851
JUMLAH ASET		29.647.410.384	18.728.172.409
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.14	12.496.750.441	6.290.278.664
Uang Muka dari KPPN	C.15	800.803.521	683.175.177
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.297.553.962	6.973.453.841
JUMLAH KEWAJIBAN		13.297.553.962	6.973.453.841
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	16.349.856.422	11.754.718.568
JUMLAH EKUITAS		16.349.856.422	11.754.718.568
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.647.410.384	18.728.172.409

Jakarta, 30 April 2024

Sekretaris Kabinet,



III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT KABINET LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
BEBAN			
	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	220.919.048.573	181.760.161.678
Beban Persediaan	D.2.2	6.265.768.806	6.241.296.138
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	73.467.529.360	68.668.801.376
Beban Pemeliharaan	D.2.4	6.782.639.966	5.156.436.314
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	29.815.155.167	31.484.564.635
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	8.687.966.075	6.545.760.719
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.2.7	-	17.500
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		345.938.107.947	299.857.038.360
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(345.938.107.947)	(299.857.038.360)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.3		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	770.286.350	1.312.096.651
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	2.000.000	29.758.214
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		768.286.350	1.282.338.437
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.3	351.312.348	231.179.569
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.4	231.902.308	173.381.407
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		119.410.040	57.798.162
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		887.696.390	1.340.136.599
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	D.4	(345.050.411.557)	(298.516.901.761)

Jakarta, 30 April 2024

Sekretaris Kabinet,



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT KABINET
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	11.754.718.568	26.135.395.890
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(345.050.411.557)	(298.516.901.761)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS *)	E.3	17.500	(220.234.994)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	-	(4.938.012)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	-	(215.384.482)
Koreksi Lain-lain	E.3.3	17.500	87.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	349.645.531.911	284.356.459.433
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		4.595.137.854	(14.380.677.322)
EKUITAS AKHIR	E.5	16.349.856.422	11.754.718.568

Jakarta, 30 April 2024

Sekretaris Kabinet,



Pranono Anung

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet RI (Setkab) adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Entitas berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat.

Dasar hukum pendirian entitas adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

6. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
7. Penyelenggaraan dukungan teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
8. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
9. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
10. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
11. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Kabinet berkomitmen dengan visi ***“Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi Sekretariat Kabinet yaitu “Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui:

1. Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien dan responsif;

3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.”

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan terdiri atas Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputi Bidang Administrasi, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Staf Ahli, Inspektorat, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Pusat Pembinaan Penerjemah dengan rincian sebagai berikut:

1. Wakil Sekretaris Kabinet

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

3. Deputi Bidang Perekonomian

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Bertanggung jawab membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat,

atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

7. Deputi Bidang Administrasi

Bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

8. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

9. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum.

10. Staf Ahli Bidang Komunikasi

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi.

11. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi.

12. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional.

13. Staf Khusus Sekretaris Kabinet

Bertanggung jawab untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet sesuai penugasan Sekretaris Kabinet yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Sekretariat Kabinet.

14. Inspektorat

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

15. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebaran data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

16. Pusat Pembinaan Penerjemah

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

Jumlah satker yang ada pada Sekretariat Kabinet adalah 1 (satu) satker.

Ringkasan data umum Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet (114)

Unit Organisasi : Sekretariat Kabinet (114)

Provinsi : DKI Jakarta

Satuan Kerja : Sekretariat Kabinet (114.01)

Kode Bagian Anggaran : 114

Kode Satker : 403112

Alamat : Jalan Veteran No. 18 Jakarta Pusat

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet juga memberikan dukungan administrasi kepada Utusan Khusus Presiden/Staf Khusus Presiden/Staf Khusus Wakil Presiden

(UKP/SKP/SKWP) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Presiden Joko Widodo telah mengangkat 1 (satu) UKP, 10 (sepuluh) orang SKP dan 10 (sepuluh) orang SKWP. Pengangkatan UKP/SKP/SKWP tersebut dilakukan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden;
2. Keputusan Presiden Nomor 133/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden;
3. Keputusan Presiden Nomor 161/TPA sampai dengan 165/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden;
4. Keputusan Presiden Nomor 167/TPA sampai dengan 168/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden;
5. Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden;
6. Keputusan Presiden Nomor 48/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Presiden Nomor 159/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden.

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 terdapat pergantian jabatan berupa penambahan, pengangkatan, pemberhentian dan pengunduran diri pejabat pada UKP, SKP dan SKWP. Berikut rincian UKP, SKP dan SKWP sampai dengan 31 Desember 2023 yang mendapatkan dukungan administrasi dari Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

- Utusan Khusus Presiden
 1. Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono
- Staf Khusus Presiden
 1. Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho
 2. Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana
 3. Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit
 4. Staf Khusus Presiden Arif Budimanta
 5. Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia
 6. Staf Khusus Presiden Diaz Faisal Malik Hendropriyono
 7. Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono
 8. Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi
 9. Staf Khusus Presiden Putri Indahsari Tanjung
 10. Staf Khusus Presiden Gracia Billy Mambrasar
- Staf Khusus Wakil Presiden
 1. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Masyukri Abdillah
 2. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Masduki Baidlowi
 3. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
 4. Staf Khusus Wakil Presiden Robikin Emhas, S.H., M.H.
 5. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. Lukmanul Hakim, M. Si.
 6. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
 7. Staf Khusus Wakil Presiden Drs. Muhammad Imam Aziz
 8. Staf Khusus Wakil Presiden Dr. R. Gatot Prio Utomo
 9. Staf Khusus Wakil Presiden Prof. Dr. Zumrotul Mukaffa, M. Ag.
 10. Staf Khusus Wakil Presiden H. Arif Rahmansyah Marbun, S. E.

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI dan Monitoring SAKTI yang selanjutnya disingkat MonSAKTI. SAKTI merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat

instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, dan modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Sedangkan MonSAKTI adalah Monitoring SAKTI yang digunakan oleh Pengguna Aplikasi SAKTI untuk pengawasan dan pengendalian internal Satker. Selanjutnya, dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Unaudited* seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dihasilkan melalui Aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi MonSAKTI.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Kabinet menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Kabinet dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Kabinet. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat Kabinet adalah Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian

yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Berikut perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (DJKN)	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. **Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. PENJELASAN *AUTOMATIC ADJUSTMENT*, PENAMBAHAN ANGGARAN BELANJA, REALOKASI, BUKA BLOKIR, DAN REVISI ANGGARAN TA 2023

Dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik, kebijakan *Automatic Adjustment* dipandang masih perlu dilanjutkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 sebagaimana yang telah diterapkan pada TA 2022. Kebijakan *Automatic Adjustment* tersebut merupakan pemblokiran sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun dan diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang penting. Hal ini merupakan strategi antisipatif dalam memitigasi risiko sehingga seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global tersebut. *Automatic Adjustment* TA 2023 ditetapkan dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022, tanggal 9 Desember 2022, tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023.

Sekretariat Kabinet telah melakukan *Automatic Adjustment* Rp28.183.378.000 dari alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp352.292.228.000. *Automatic Adjustment* tersebut tidak memotong pagu anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2023, tetapi hanya dilakukan pemblokiran otomatis anggaran sementara oleh Kementerian Keuangan sehingga pencadangan tersebut tidak dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta kebutuhan operasional Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan

Ketahanan Pangan serta pembangunan Sistem Informasi Sekretariat Kabinet *Economic Surveillance* (SKES), Sekretaris Kabinet mengajukan permohonan tambahan anggaran Sekretariat Kabinet sebesar Rp23.054.920.000 kepada Menteri Keuangan sesuai dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor B-062/Seskab/Adm/01/2023, tanggal 24 Januari 2023, tentang Permohonan Tambahan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2023.

Permohonan tambahan anggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan mengalihkan Satuan Anggaran Bagian Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Sekretariat Kabinet (BA 114) sebesar Rp10.583.514.000 sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-52/MK.2/2023, tanggal 7 Maret 2023, tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Sekretariat Kabinet (BA 114) untuk Kegiatan dan Kebutuhan Operasional Utusan Khusus Presiden bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

Pada periode Juli 2023, Menteri Keuangan, melalui surat nomor S-557/MK.2/2023, tanggal 7 Juli 2023, tentang Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023, menyampaikan bahwa terhadap anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai yang masih tercantum dalam halaman IV DIPA akan direalokasi ke Bagian Anggaran Umum Negara (BA BUN). Dengan adanya kebijakan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan realokasi anggaran blokir belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp21.739.582.000.

Sehubungan dengan adanya kekurangan anggaran belanja pegawai Sekretariat Kabinet TA 2023, berikut beberapa hal yang dilakukan Sekretariat Kabinet diantaranya:

1. Pengajuan pembukaan pencadangan anggaran TA 2023 kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0355/Seskab/Adm/07/2023, tanggal 27 Juli 2023, tentang Permohonan Pembukaan Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Sekretariat Kabinet TA 2023. Pembukaan blokir tersebut disetujui oleh Menteri

Keuangan sebesar Rp6.443.796.000 melalui surat Nomor S-301/MK.2/2023, tanggal 28 Agustus 2023, tentang Penyampaian Tindak Lanjut Permohonan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* Sekretariat Kabinet TA 2023.

2. Pengajuan Anggaran Belanja Pegawai Tambahan kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-470/Seskab/Adm/07/2023, tanggal 22 September 2023, tentang Permohonan Penambahan Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2023. Penambahan Anggaran Belanja Pegawai tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar Rp3.556.204.000 melalui surat Nomor S-398/MK.2/2023, tanggal 30 Oktober 2023, tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet (BA 114) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Setkab TA 2023.
3. Pengajuan Anggaran Belanja Pegawai Tambahan kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-524/Seskab/Adm/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023, tentang Permohonan Tambahan Anggaran Sekretariat Kabinet TA 2023. Penambahan Anggaran Belanja Pegawai tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan sebesar Rp11.913.048.000 melalui surat Nomor S-478/MK.2/2023, tanggal 9 Desember 2023, tentang Penetapan Satuan Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Sekretariat Kabinet (BA 114) untuk Tambahan Anggaran Belanja Pegawai Setkab TA 2023.

Dengan demikian, dengan adanya penambahan anggaran, realokasi anggaran serta pembukaan blokir anggaran, alokasi anggaran Sekretariat Kabinet yang semula sebesar Rp352.292.228.000 menjadi Rp356.605.412.000. Rincian belanja yang dilakukan *Automatic Adjustment* per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Belanja *Automatic Adjustment*, Penambahan Anggaran, Realokasi, Buka Blokir dan Revisi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023

URAIAN	Anggaran Semula	<i>Automatic Adjustment</i>	Anggaran Belanja Tambahan dari BUN	Realokasi Anggaran ke BA BUN	Buka Blokir	Revisi Anggaran	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	196.753.839.000	21.739.582.000	15.469.252.000	(21.739.582.000)	-	31.927.167.000	222.410.676.000
Belanja Barang	142.097.225.000	6.443.796.000	10.583.514.000	-	6.443.796.000	(32.286.755.000)	120.393.984.000
Belanja Modal	13.441.164.000	-	-	-	-	359.588.000	13.800.752.000
Jumlah	352.292.228.000		26.052.766.000	(21.739.582.000)			356.605.412.000

Sekretariat Kabinet juga beberapa kali melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Revisi terakhir sesuai surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2023 Nomor: SP DIPA-114.01.1.403112/2023, tanggal 27 Desember 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Sekretariat Kabinet masih mengalokasikan anggaran belanja barang sebesar Rp84.482.000 untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menggunakan akun-akun khusus sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020, tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19. Rincian anggaran, realisasi dan sisa anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Realisasi Belanja Barang Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk Periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.580.000	-	2.580.000	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	81.902.000	42.989.262	38.912.738	52,49
JUMLAH		84.482.000	42.989.262	41.492.738	50,89

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 telah terealisasi sebesar Rp42.989.262 atau 50,89 persen dari anggaran sebesar Rp84.482.000. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 menurun signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu Presiden RI juga mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia dan beralih menjadi endemi sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menerbitkan surat nomor S-24/PB/PB.6/2023, tanggal 24 Agustus 2023, hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19 yang memuat kebijakan terkait penggunaan akun COVID-19 hanya digunakan sampai dengan semester I 2023 atau sampai dengan berakhirnya status pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, pada semester II 2023

Sekretariat Kabinet tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19. Berikut penggunaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 selama semester I direalisasikan untuk hal berikut:

1. Penyelenggaraan *Rapid Test*/SWAB PCR bagi pejabat yang menghadiri Rapat Terbatas dan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden.
2. Penyelenggaraan *Rapid Test*/SWAB PCR bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19.
3. Pengadaan penyemprotan disinfektan ruang kerja Sekretariat Kabinet.

Pagu Anggaran
Rp356.605.412.000

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2023 semula adalah sebesar Rp352.292.228.000, setelah dilakukan penambahan anggaran, realokasi anggaran dan revisi DIPA sehingga anggaran Sekretariat Kabinet menjadi sebesar Rp356.605.412.000. Dengan demikian, rincian pagu anggaran setelah revisi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	2023	
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	196.753.839.000	222.410.676.000
Belanja Barang	142.097.225.000	120.393.984.000
Belanja Modal	13.441.164.000	13.800.752.000
JUMLAH BELANJA	352.292.228.000	356.605.412.000

Apabila dilihat berdasarkan program, jumlah anggaran Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

Tabel 11 Pagu Anggaran Berdasarkan Program

PROGRAM	2023	
	Awal	Revisi
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	44.062.850.000	35.330.454.000
Program Dukungan Manajemen (WA)	308.229.378.000	321.274.958.000
JUMLAH BELANJA	352.292.228.000	356.605.412.000

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp940.501.269 dan Rp1.702.967.941. Sekretariat Kabinet tidak menentukan estimasi PNB, karena Sekretariat Kabinet bukan merupakan instansi yang secara khusus mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Namun, pada tahun berjalan terdapat realisasi PNB yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Lain-Lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

Realisasi Pendapatan PNB sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 44,77 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Hal tersebut disebabkan karena jumlah BMN yang dilakukan pemindahtanganan dengan mekanisme penjualan secara lelang menurun.

Perbandingan realisasi PNB pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 berdasarkan jenis akun adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Realisasi Pendapatan PNB untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	740.453.010	1.259.540.656	-41,21
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	33.333.333	124.444.887	-73,21
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	24.750.000	-
Jumlah Pendapatan Pengelolaan BMN		773.786.343	1.408.735.543	-45,07
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	158.406.348	67.728.892	133,88
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	8.308.578	1.024.691	710,84
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	225.478.815	-
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		166.714.926	294.232.398	-43,34
Jumlah Pendapatan PNB		940.501.269	1.702.967.941	-44,77

Sedangkan rincian PNB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp740.453.010 berupa:
 - a. Penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp3.499.993 berupa sisa angsuran penjualan kendaraan mobil dinas jabatan tanpa melalui

mekanisme lelang selama bulan Januari s.d. Maret 2023 (3 kali angsuran) sesuai Perjanjian Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan nomor Perj/1/Setkab/Adm/03/2021, tanggal 8 Maret 2021. Penjualan kendaraan mobil dinas jabatan dilakukan secara angsuran sebanyak 24 kali sejak bulan April 2021.

- b. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 736.953.017 sesuai Risalah Lelang Nomor 668/26/2023, tanggal 3 Agustus 2023 berupa 8 (delapan) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000657752 dan NTPN CFDBD8N3EAKEIS6T, tanggal 7 Agustus 2023.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp33.333.333 sesuai Risalah Lelang Nomor 1196/26/2023, tanggal 4 Desember 2023 berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin dan barang persediaan yang telah rusak berat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000056112 dan NTPN ECED561QUR95A8MC, tanggal 6 Desember 2023.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp158.406.348 berupa pengembalian belanja tunjangan jabatan struktural PNS TA 2022 sehubungan telah dibayarkan tunjangan fungsional untuk 33 (tiga puluh tiga) pegawai sebesar Rp158.405.000 dan pengembalian pembulatan gaji PNS TA 2022 sebesar Rp1.348.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp8.308.578 berupa pengembalian kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas TA 2022.

*Realisasi Belanja
Rp350.586.033.180*

B.2 Belanja

Realisasi belanja bruto pada 31 Desember 2023 sebesar Rp350.811.366.489 atau 98,38 persen dari anggaran belanja sebesar Rp356.605.412.000. Pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp225.333.309, sehingga realisasi belanja neto Sekretariat Kabinet pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp350.586.033.180 atau sebesar 98,31 persen dari anggaran belanja. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian belanja gaji dan tunjangan PNS, pengembalian belanja gaji dan tunjangan non PNS, dan pengembalian tunjangan khusus pegawai, serta pengembalian belanja barang berupa pengembalian belanja perjalanan dinas.

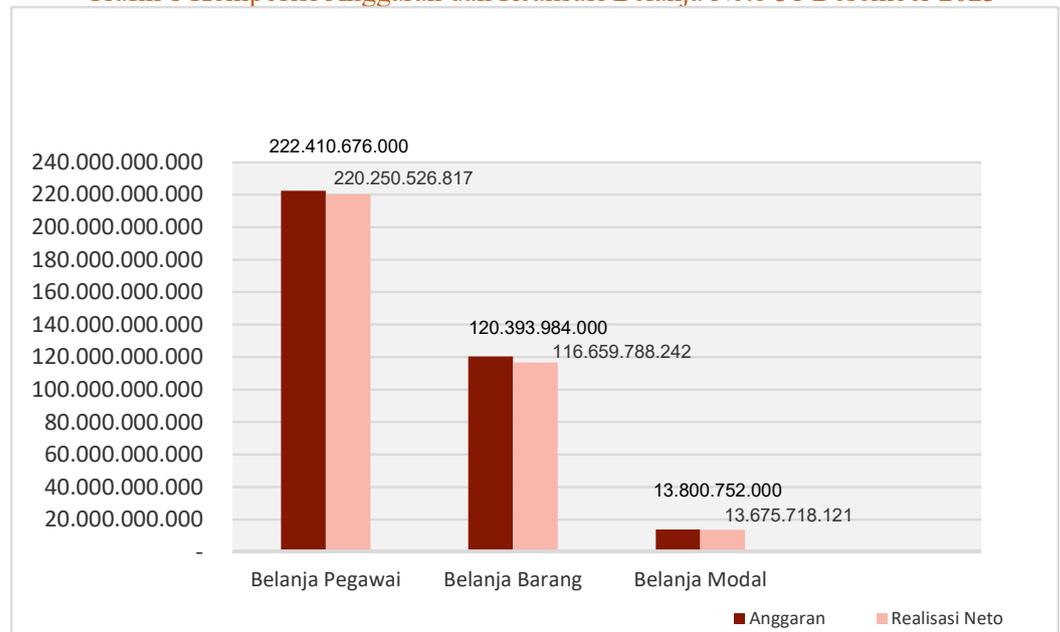
Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023					
	Anggaran	Realisasi Bruto	%	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	%
Belanja Pegawai	222.410.676.000	220.389.383.050	99,09	138.856.233	220.250.526.817	99,03
Belanja Barang	120.393.984.000	116.746.265.318	96,97	86.477.076	116.659.788.242	96,90
Belanja Modal	13.800.752.000	13.675.718.121	99,09	0	13.675.718.121	99,09
Jumlah	356.605.412.000	350.811.366.489	98,38	225.333.309	350.586.033.180	98,31

Dalam bentuk grafik, komposisi anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Neto 31 Desember 2023



Realisasi belanja pada 31 Desember 2023 berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Belanja Berdasarkan Program Per 31 Desember 2023

Program	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Neto	% Neto
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	35.330.454.000	33.096.814.990	86.040.076	33.010.774.914	93,43
Program Dukungan Manajemen (WA)	321.274.958.000	317.714.551.499	139.293.233	317.575.258.266	98,85
JUMLAH	356.605.412.000	350.811.366.489	225.333.309	350.586.033.180	98,31

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	220.250.526.817	181.769.542.466	21,17
Belanja Barang	116.659.788.242	112.116.917.164	4,05
Belanja Modal	13.675.718.121	1.752.855.250	680,20
JUMLAH	350.586.033.180	295.639.314.880	18,59

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,59 persen dari realisasi belanja periode yang sama tahun 2022. Kenaikan realisasi belanja tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai sebesar 21,17 persen karena adanya penambahan pegawai PNS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebanyak 4 orang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebanyak 2 orang, adanya kenaikan jabatan bagi pejabat dan pegawai, serta adanya tunjangan khusus dukungan tugas kepresidenan di lingkungan Sekretariat Kabinet, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berlaku mulai periode September 2023.
2. Kenaikan Belanja Barang sebesar 4,05 persen yang disebabkan oleh:
 - a. Peningkatan belanja perjalanan dinas luar negeri yang signifikan dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, studi banding pengelolaan kelembagaan, *benchmarking* sertifikasi kepakaran penerjemah, *workshop Human Resource*, diskusi *developmental disorder*, pendampingan pelaksanaan *English Language and Communication Skill Course for Indonesia Government Translator/Interpreter*, rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan tuberkulosis dan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program peningkatan investasi pada Proyek Prioritas Strategis 2023.
 - b. Peningkatan belanja barang persediaan berupa pengadaan plakat, barang cetakan, perlengkapan komputer, *toner*, *security paper*, *cover* dan amplop Risalah Presiden serta keperluan sehari-hari dan alat rumah tangga.

- c. Peningkatan belanja barang operasional berupa adanya Dana Operasional Menteri (DOM) untuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dan adanya penambahan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Kabinet.
- d. Peningkatan belanja jasa berupa adanya pengadaan jasa konsultan terkait dampak kebijakan pengentasan kemiskinan nasional dan ketahanan pangan.

Namun demikian, persentase realisasi penyerapan belanja perjalanan dinas dalam negeri mengalami penurunan sehubungan dengan optimalisasi anggaran belanja.

- 3. Peningkatan Belanja Modal sebesar 680,20 persen karena adanya pengadaan *data synchronization platform*, *Application Programming Interface (API) management platform*, *document management platform*, pengadaan *smart row rack*, pembangunan *cloud storage* internal Sekretariat Kabinet dan Sistem Informasi Layanan Manajemen Kabinet, pengadaan renovasi Gedung Juanda yang tercatat sebagai BMN pada Kementerian Sekretariat Negara, serta pengadaan Alat Pengolah Data (APD) dalam rangka peremajaan APD yang telah usang maupun atas permintaan dari *user/unit* kerja untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.

Belanja Pegawai
Rp220.250.526.817

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp220.250.526.817 dan Rp181.769.542.466 atau mengalami kenaikan 21,17 persen dari realisasi belanja pegawai periode yang sama tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai PNS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebanyak 4 orang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebanyak 2 orang, adanya kenaikan jabatan bagi pejabat dan pegawai, serta adanya tunjangan khusus dukungan tugas kepresidenan di lingkungan Sekretariat Kabinet, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berlaku mulai periode September 2023. Perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	2023	2022	Naik Turun %
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39.590.240.478	39.528.567.481	0,16
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(18.188.550)	(3.515.939)	417,32
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	59.454.886.732	57.084.353.041	4,15
	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	(96.949.933)	(17.705.000)	-
5122	Belanja Lembur	1.581.297.000	726.780.000	117,58
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	119.762.958.840	84.451.062.883	41,81
	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	(23.717.750)	-	-
JUMLAH		220.250.526.817	181.769.542.466	21,17

Belanja Barang
Rp116.659.788.242

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp116.659.788.242 dan Rp112.116.917.164 atau mengalami kenaikan sebesar 4,05 persen dari realisasi belanja barang periode yang sama tahun lalu. Penyebab kenaikan realisasi belanja barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan belanja perjalanan dinas luar negeri sehubungan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, studi banding pengelolaan kelembagaan, *benchmarking* sertifikasi kepakaran penerjemah, *workshop Human Resource*, diskusi *developmental disorder*, pendampingan pelaksanaan *English Language and Communication Skill Course for Indonesia Government Translator/Interpreter*, rekomendasi kebijakan terkait

penanggulangan tuberkulosis dan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program peningkatan investasi pada Proyek Prioritas Strategis 2023.

2. Peningkatan belanja barang persediaan berupa pengadaan plakat, barang cetakan, perlengkapan komputer, *toner*, *security paper*, *cover* dan amplop Risalah Presiden serta keperluan sehari-hari dan alat rumah tangga.
3. Peningkatan belanja barang operasional berupa adanya Dana Operasional Menteri (DOM) untuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, dan adanya penambahan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Kabinet.
4. Peningkatan belanja jasa berupa adanya pengadaan jasa konsultan tentang dampak kebijakan pengentasan kemiskinan nasional dan ketahanan pangan.

Namun demikian, persentase realisasi penyerapan belanja perjalanan dinas dalam negeri mengalami penurunan sehubungan dengan optimalisasi anggaran belanja. Rincian perbandingan realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	URAIAN	2023	2022	Naik/(Turun)	%
5211	Belanja Barang Operasional	23.524.373.086	20.709.385.259	2.814.987.827	13,59
5212	Belanja Barang Non Operasional	6.458.642.971	7.403.003.606	(944.360.635)	(12,76)
5218	Belanja Barang Persediaan	4.220.415.614	3.194.917.675	1.025.497.939	32,10
5221	Belanja Jasa	43.971.574.772	40.597.561.363	3.374.013.409	8,31
5231	Belanja Pemeliharaan	8.669.626.632	8.719.176.048	(49.549.416)	(0,57)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	23.821.106.729	29.200.787.902	(5.379.681.173)	(18,42)
	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	(2.034.000)	(2.884.170)	850.170	(29,48)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.080.525.514	2.294.969.481	3.785.556.033	164,95
	Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri	(84.443.076)	0	(84.443.076)	-
JUMLAH		116.659.788.242	112.116.917.164	4.542.871.078	4,05

Pada TA 2023, Sekretariat Kabinet masih mengalokasikan anggaran belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp84.482.000. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat realisasi anggaran atas belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp42.989.262 atau 50,89 persen berupa penyelenggaraan *Rapid Test/Swab Test* bagi pejabat yang menghadiri rapat terbatas, rapat internal yang dipimpin oleh Presiden, rapat Tim Penilai Akhir, dan bagi pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19, serta pengadaan

penyemprotan disinfektan ruang kerja Sekretariat Kabinet. Rincian realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Belanja Barang (Akun COVID-19) untuk Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.580.000	-	2.580.000	0,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	81.902.000	42.989.262	38.912.738	52,49
JUMLAH		84.482.000	42.989.262	41.492.738	50,89

Belanja Modal
Rp13.675.718.121

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.675.718.121 dan Rp1.752.855.250. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 680,20 persen dibandingkan realisasi belanja modal periode yang sama tahun lalu. Penyebab kenaikan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan *data synchronization platform, Application Programming Interface (API) management platform, dan document management platform* dalam rangka mendukung aplikasi layanan manajemen kabinet dan interkoneksi aplikasi.
2. Pengadaan *smart row rack* untuk meningkatkan dukungan utilitas server.
3. Pengadaan renovasi Gedung Juanda yang tercatat sebagai BMN pada Kementerian Sekretariat Negara.
4. Pengadaan APD guna peremajaan atas APD yang telah usang dan permintaan dari *user/unit* kerja untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi.
5. Pembangunan *Cloud Storage* Internal Sekretariat Kabinet dan Sistem Informasi Layanan Manajemen Kabinet.

Rincian perbandingan realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	2023	2022	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.446.836.500	1.331.443.750	233,99
5361	Belanja Modal Lainnya	9.228.881.621	421.411.500	2089,99
JUMLAH		13.675.718.121	1.752.855.250	680,20

B.6 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Pengungkapan Capaian Output Strategis Sekretariat Kabinet

Selama periode Tahun 2023, capaian output strategis Sekretariat Kabinet berada pada Sasaran Strategis ke-1 dan ke-2 berupa rekomendasi kebijakan, antara lain:

- a. 453 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan, dan seluruhnya telah dimanfaatkan oleh *stakeholders*.
- b. 485 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders*.
- c. 72 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders*.
- d. 161 rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh *stakeholders*.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan pada tahun ini seluruhnya telah berhasil ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

Sedangkan seluruh output Sekretariat Kabinet yang telah dicapai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Capaian Output Per 31 Desember 2023

Unit Kerja	Uraian	Anggaran			Output				Gap (9-5)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Keluaran/ Output Dihilaskan			Progress Capaian Output	
					Target Keluaran	Satuan	Realisasi Volume Keluaran		
Polhukam 1 (Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	181.911.000	181.910.475	100,00%	9	Rekomendasi Kebijakan	9,00	100,00%	0,00%
Polhukam 1 (Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	301.768.000	301.590.104	99,94%	7	Rekomendasi Kebijakan	7,00	100,00%	0,06%
Polhukam 2 (Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara)	Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	278.638.000	278.425.741	99,92%	9	Rekomendasi Kebijakan	9,00	100,00%	0,08%
Polhukam 2 (Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	177.073.000	176.948.027	99,93%	6	Rekomendasi Kebijakan	6,00	100,00%	0,07%
Polhukam 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional)	Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	442.273.000	442.270.480	100,00%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	0,00%
Polhukam 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	109.829.000	109.829.000	100,00%	8	Rekomendasi Kebijakan	8,00	100,00%	0,00%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	564.970.000	564.962.158	100,00%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,00%
Polhukam 4 (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	237.956.000	237.943.631	99,99%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,01%
Perekonomian 1 (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha)	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	133.718.000	133.673.665	99,97%	8	Rekomendasi Kebijakan	8,00	100,00%	0,03%
Perekonomian 1 (Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	462.230.000	458.618.538	99,22%	18	Rekomendasi Kebijakan	18,00	100,00%	0,78%
Perekonomian 2 (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	295.703.000	295.700.062	100,00%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,00%
Perekonomian 2 (Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	490.114.000	489.034.846	99,78%	15	Rekomendasi Kebijakan	15,00	100,00%	0,22%
Perekonomian 3 (Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	104.574.000	104.572.441	100,00%	12	Rekomendasi Kebijakan	12,00	100,00%	0,00%
Perekonomian 3 (Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	478.225.000	478.181.161	99,99%	23	Rekomendasi Kebijakan	23,00	100,00%	0,01%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	449.675.000	449.524.115	99,97%	12	Rekomendasi Kebijakan	12,00	100,00%	0,03%
Perekonomian 4 (Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi	320.529.000	320.436.083	99,97%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,03%
PMK1 (Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga)	Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	252.964.000	252.454.422	99,80%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	0,20%
PMK1 (Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	243.270.000	243.261.048	100,00%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,00%
PMK2 (Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	207.503.000	191.116.098	92,10%	9	Rekomendasi Kebijakan	9,00	100,00%	0,00%

Unit Kerja	Uraian	Anggaran			Output				Gap (9-5)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Keluaran/ Output Dihilangkan			Progress Capaian Output	
					Target Keluaran	Satuan	Realisasi Volume Keluaran		
PMK2 (Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan	173.538.000	167.209.932	96,35%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	3,65%
PMK3 (Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)	Rekomendasi kebijakan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	190.615.000	185.731.431	97,44%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	2,56%
PMK3 (Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	116.597.000	106.979.610	91,75%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	8,25%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	Rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	126.859.000	126.554.185	99,76%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	0,24%
PMK4 (Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	242.191.000	236.581.612	97,68%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	2,32%
Marivest 1 (Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan)	Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	349.115.000	348.903.443	99,94%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100%	0,06%
Marivest 1 (Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	208.881.000	208.832.878	99,98%	10	Rekomendasi Kebijakan	6,00	60,00%	-39,98%
Marivest 2 (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup)	Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	406.836.000	398.024.974	97,83%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	2,17%
Marivest 2 (Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	155.065.000	154.950.938	99,93%	7	Rekomendasi Kebijakan	7,00	100,00%	0,07%
Marivest 3 (Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum)	Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	516.826.000	516.414.365	99,92%	12	Rekomendasi Kebijakan	12,00	100,00%	0,08%
Marivest 3 (Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	125.702.000	125.580.656	99,90%	9	Rekomendasi Kebijakan	9,00	100,00%	0,10%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan)	Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	507.000.000	506.802.414	99,96%	11	Rekomendasi Kebijakan	11,00	100,00%	0,04%
Marivest 4 (Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan)	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	228.592.000	228.533.655	99,97%	10	Rekomendasi Kebijakan	10,00	100,00%	0,03%
DKK 1 (Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan)	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	1.960.855.000	1.931.703.562	98,51%	6	Sidang	6,00	100,00%	1,49%
DKK 2 (Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan)	Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	921.480.000	909.272.404	98,68%	6	Sidang	6,00	100,00%	1,32%
DKK 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol)	Layanan Hubungan Masyarakat	865.166.000	843.893.481	97,54%	1	Layanan	1,00	100,00%	2,46%
DKK 3 (Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol)	Layanan Protokol	557.583.000	529.833.553	95,02%	1	Layanan	1,00	100,00%	4,98%
DKK 4 (Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan)	Naskah kepresidenan	387.059.000	383.777.852	99,15%	160	Dokumen	175	109,38%	10,22%
DKK 4 (Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan)	Dokumen terjemahan	195.677.000	195.411.360	99,86%	500	Dokumen	500	100,00%	0,14%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan Perkantoran	222.410.676.000	220.389.383.050	99,09%	1	Layanan	1,00	100,00%	0,91%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan Perkantoran	222.410.676.000	220.389.383.050	99,09%	1	Layanan	1,00	100,00%	0,91%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan Manajemen SDM	5.296.147.000	5.259.095.764	99,30%	5	Layanan	5,00	100,00%	0,70%

Unit Kerja	Uraian	Anggaran			Output				Gap (9-5)
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Keluaran/ Output Dihilangkan			Progress Capaian Output	
					Target Keluaran	Satuan	Realisasi Volume Keluaran		
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan Hukum	10.200.000	10.200.000	100,00%	1	Layanan	1,00	100,00%	0,00%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	203.709.000	202.809.896	99,56%	1	Layanan	1,00	100,00%	0,44%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Layanan bantuan hukum	22.000	-	0,00%	1	Layanan	1,00	100,00%	100,00%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rancangan Keputusan Presiden hasil sidang Tim Penilai Akhir	1.638.784.000	1.599.748.015	97,62%	100	Keppres	96,00	96,00%	-1,62%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Perencanaan Penganggaran	309.102.000	280.859.715	90,86%	3	Dokumen	3,00	100,00%	9,14%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	472.063.000	471.992.784	99,99%	4	Dokumen	4,00	100,00%	0,01%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan revisi anggaran	144.229.000	143.754.474	99,67%	1	Layanan	1	100,00%	0,33%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	160.913.000	159.812.344	99,32%	6	Dokumen	6	100,00%	0,68%
Biro Umum	Layanan Perkantoran	63.557.726.000	62.866.067.659	98,91%	1	Layanan	1	100,00%	1,09%
Biro Umum	Layanan Barang Milik Negara	1.111.261.000	1.076.044.522	96,83%	1	Layanan	1,00	100,00%	3,17%
Biro Umum	Layanan Umum	1.119.863.000	1.089.988.254	97,33%	1	Layanan	1	100,00%	2,67%
Biro Umum	Layanan Sarana Internal	2.151.083.000	2.144.254.000	99,68%	186	Unit	186	100,00%	0,32%
Biro Umum	Layanan Prasarana Internal	206.090.000	182.433.226	88,52%	97	m2	97	100,00%	11,48%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	225.948.000	222.572.366	98,51%	12	Dokumen	12,00	100,00%	1,49%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Umum	44.760.000	44.689.966	99,84%	1	Layanan	1,00	100,00%	0,16%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Data dan Informasi	109.952.000	103.207.270	93,87%	2	Layanan	2,00	100,00%	6,13%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.042.558.000	6.020.658.182	99,64%	31	Unit	31,00	100,00%	0,36%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Layanan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.936.351.000	3.729.469.407	94,74%	30	Unit	29	96,67%	1,92%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sistem Informasi Layanan Manajemen Kabinet	8.407.738.000	8.403.002.000	99,94%	1	Sistem Informasi	1	100,00%	0,06%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Penerjemah	61.000.000	-	0,00%	1	Sistem Informasi	0	0,00%	0,00%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Arsitektur dan Roadmap Pengembangan TIK 2025-2029	563.448.000	499.287.435	88,61%	1	Sistem Informasi	1	100,00%	11,39%
Inspektorat	Layanan Umum	6.642.000	5.451.800	82,08%	1	Layanan	1,00	100,00%	17,92%
Inspektorat	Layanan Audit Internal	321.225.000	319.171.894	99,36%	28	Laporan	28,00	100,00%	0,64%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP)	1.302.641.000	1.294.746.494	99,39%	120	Rekomendasi Kebijakan	190,00	158,33%	58,94%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Layanan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP)	747.820.000	737.662.813	98,64%	45	Orang	60	133,33%	34,69%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah	61.362.000	61.362.000	100,00%	25	Orang	25	100,00%	0,00%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	Layanan Reformasi Kinerja	334.459.000	329.680.709	98,57%	30	Dokumen	30	100,00%	1,43%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	Layanan Protokol	501.518.000	386.502.427	154,16%	6	Layanan	6	100,00%	-54,16%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan RB	Layanan Umum	1.808.931.000	1.670.816.093	92,36%	4	Layanan	4	100,00%	7,64%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	Layanan pendampingan Sekretaris Pribadi dalam pelaksanaan tugas Presiden	266.129.000	242.491.988	91,12%	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	100,00%	8,88%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	Layanan khusus SKP kepada Presiden berdasarkan penugasan	7.258.721.000	7.035.362.652	96,92%	10	Rekomendasi Kebijakan	10	100,00%	3,08%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	Layanan khusus SKWP kepada Wakil Presiden berdasarkan penugasan	2.639.351.000	2.452.483.221	92,92%	10	Rekomendasi Kebijakan	10	100,00%	7,08%
Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	Layanan khusus Utusan Khusus Presiden kepada Presiden berdasarkan penugasan	8.869.835.000	7.231.240.441	81,53%	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00%	18,47%
Polhukam, Perekonomian, PMK, Kemaritiman dan Investasi, DKK, Pusbinter	Layanan Umum	122.640.000	121.548.183	99,11%	6	Layanan	6	100,00%	0,89%
Pusbinter	Layanan Data dan Informasi	10.007.000	7.888.010	78,82%	1	Layanan	1	100,00%	21,18%
Polhukam, Perekonomian, PMK, Kemaritiman dan Investasi, DKK, Pusbinter	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	59.203.000	59.006.500	99,67%	357	Dokumen	357	100,00%	0,33%
Polhukam, Perekonomian, PMK, Kemaritiman dan Investasi, DKK, Pusbinter	Layanan Reformasi Kinerja	142.745.000	141.176.535	98,90%	269	Dokumen	269	100,00%	1,10%

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp800.803.521

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp800.803.521 dan Rp683.175.177 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat sisa kas UP di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.803.521. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan awal tahun 2024. Hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-195/PB/2023, tanggal 7 Desember 2023, hal Persetujuan Penggunaan Sisa Dana Uang Persediaan (UP) Tunai Tahun Anggaran (TA) 2023 yang diperhitungkan dengan Penerimaan UP Tunai TA 2024.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Uang Tunai	99.575.207	131.434.946
Rekening Bank	701.228.314	551.740.231
JUMLAH	800.803.521	683.175.177

Belanja Dibayar Dimuka
Rp659.252.775

C.2 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp659.252.775 dan Rp1.123.663.654. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Belanja Dibayar Dimuka mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp464.410.879. Hal ini disebabkan adanya beberapa lisensi yang sudah digunakan dan telah berakhir masa manfaatnya. Belanja Dibayar Dimuka tahun 2023 berasal dari pembayaran *voucher*/kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih belum terpakai sebanyak 275 lembar kupon sebesar Rp13.750.000. Selain itu, Belanja Dibayar Dimuka juga berasal dari paket pekerjaan berupa lisensi yang dibebankan pada akun Beban

Pemeliharaan Lainnya sebesar Rp277.095.243, Beban Sewa sebesar Rp199.081.115, dan Beban Jasa Lainnya sebesar Rp169.326.417. Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

No.	Paket Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	No. SPM	No. SP2D	Nilai (Rp)
A. Paket Pekerjaan Lisensi (Beban Pemeliharaan Lainnya (523199))						
1	Pengadaan Lisensi Bandwith Management	11-Apr-23	11-Apr-24	00519A	230181301005424	39.796.676
2	Pengadaan Lisensi IPAM	04-Apr-23	29-Mar-24	00520A	230181302015137	13.135.512
3	Pengadaan Perpanjangan Lisensi Server Sangfor HCI	04-Dec-23	04-Dec-24	01435A	230181302041230	77.923.815
4	Pengadaan Perpanjangan Lisensi dan maintenance Support Email Zimbra NE Standard Edition	12-Dec-23	11-Dec-24	01698A	230181701009538	146.239.240
Jumlah Pengadaan Lisensi Dibayar Dimuka						277.095.243
B. Paket Pekerjaan Lisensi (Beban Sewa (522141))						
1	Pengadaan Lisensi Adobe Creative Cloud All Apps	05-Feb-23	05-Feb-24	00098A	230181302005212	9.430.997,00
2	Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference	16-Apr-23	16-Apr-24	00482A	230181302014145	52.409.591,00
3	Aplikasi Formulir Online (Jotform)	29-May-23	29-May-24	00737A	230181303012163	1.864.436,00
4	Aplikasi infografis (Canva)	14-May-23	14-May-24	01040A/ 01153A	230181303016407/ 230181701004736	3.696.229,00
5	Power BI	26-May-23	25-May-24	01153A	230181701004736	836.714,00
6	Plugin Website (userway)	24-Jul-23	24-Jul-24	01039A	230181303016406	11.282.103,00
7	Aplikasi Lisensi MonAvi Video Editor	20-Oct-23	21-Oct-24	01543A	230181303026926	5.523.634,00
8	Data Visual Analytic Platform (Tableu)	26-Oct-23	25-Oct-24	01422A	230181701006664	39.727.052,00
9	Aplikasi Survey Online (Survey Monkey)	26-Oct-23	25-Oct-24	01544A	230181303026927	12.066.856,00
10	Pengadaan Aplikasi Videografis Vyond	29-Nov-23	28-Dec-24	01546A	230181303026919	1.302.701,00
11	Pengadaan Lisensi Aplikasi Infografis Freepik	23-Nov-23	23-Nov-24	01548A	230181303026921	3.596.562,00
12	Pengadaan Aplikasi Grammarly Business	28-Nov-23	28-Nov-24	01542A	230181303026925	55.742.521,00
13	Pengadaan Lisensi Aplikasi Infografis Flaticon	28-Nov-23	28-Nov-24	01547A	230181303026920	1.601.719,00
Jumlah Pengadaan Sewa Dibayar Dimuka						199.081.115
C. Paket Pekerjaan Lisensi (Beban Jasa Lainnya (522191))						
1	Pengadaan Lisensi dan Support Aplikasi Helpdesk System Deskpro	14-Nov-23	14-Nov-24	01720A	220181303005406	169.326.417
Jumlah Pengadaan Sewa Dibayar Dimuka						169.326.417
D. Paket Pengadaan Kupon BBM Dibayar Dimuka						
1	Pengadaan Kupon BBM Dibayar Dimuka dengan Berita Acara Koreksi Nomor BA.07/SETKAB/BMN/04/2024	-	-	-	-	13.750.000
Jumlah Pengadaan Kupon BBM Dibayar Dimuka						13.750.000
JUMLAH						659.252.775

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8.308.578. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp3.499.993. Hal tersebut dikarenakan adanya pelunasan sisa angsuran penjualan kendaraan mobil dinas tanpa melalui mekanisme lelang selama bulan Januari s.d. Maret 2023 (3 kali angsuran) sesuai Perjanjian Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas

Jabatan nomor Perj/1/Setkab/Adm/03/2021, tanggal 8 Maret 2021. Penjualan kendaraan mobil dinas jabatan dilakukan secara angsuran sebanyak 24 kali sejak bulan April 2021. Bagian Lancar TPA merupakan tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan (Rp17.500). Hal tersebut dikarenakan adanya pelunasan sisa angsuran penjualan kendaraan mobil dinas tanpa melalui mekanisme lelang selama bulan Januari s.d. Maret 2023 (3 kali angsuran) sesuai Perjanjian Penjualan Tanpa Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan nomor Perj/1/Setkab/Adm/03/2021, tanggal 8 Maret 2021. Penjualan kendaraan mobil dinas jabatan dilakukan secara angsuran sebanyak 24 kali sejak bulan April 2021. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar-TPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan Bagian Lancar-TPA berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Persediaan
Rp2.856.733.488

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.856.733.488 dan Rp2.262.426.763. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sumber perolehan persediaan sampai 31 Desember 2023 seluruhnya berasal dari pembelian. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

JENIS PERSEDIAAN	2023	2022
Barang Konsumsi	2.709.943.658	2.173.785.888
Barang untuk Pemeliharaan	146.789.830	88.640.875
JUMLAH	2.856.733.488	2.262.426.763

Berdasarkan tabel di atas, kenaikan persediaan selama Tahun 2023 disebabkan adanya pengadaan plakat, barang cetakan, perlengkapan komputer, *toner*, *security paper*, *cover* dan amplop Risalah Presiden serta keperluan sehari-hari dan alat rumah tangga. Sampai dengan 31 Desember 2023 juga masih terdapat sisa barang

persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 berupa masker, disinfektan dan *handsanitizer*. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: BA.29/Setkab//OF/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023.

Peralatan dan Mesin
Rp57.720.649.541

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.720.649.541 dan Rp56.954.604.053.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp	56.954.604.053
Mutasi tambah:		4.448.279.500
Pembelian Peralatan dan Mesin		4.417.532.500
Pengembangan Nilai Aset		29.304.000
Perolehan Lainnya		1.443.000
Mutasi kurang:		3.682.234.012
Penghentian Aset dari penggunaan		3.517.186.012
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang		165.048.000
Saldo per 31 Desember 2023		57.720.649.541
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023		(46.987.145.504)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	10.733.504.037

Mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.448.279.500 berasal dari pembelian, pengembangan dan perolehan lainnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 25 Rincian Pembelian, Pengembangan dan Perolehan Lainnya Peralatan dan Mesin Sampai dengan 31 Desember 2023

NO	Nama Barang	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal Dokumen	Intrakomptabel	
					Volume	Rupiah
A. Pembelian						
1	Kulkas, Dispenser, Mesin Kopi, Troli, Switcher dsb	00429A	230181301004464	26-Apr-23	59	217.870.000
2	Printer, PC, Laptop, Scanner, Tablet PC dan Hardisk	00514A	230181302014673	16-May-23	95	1.488.040.000
3	<i>Smart Row Vertiv</i>	00689A	23018130202065	27-Jun-23	1	2.276.000.000
4	Papan Nama Presiden dan Wakil Presiden	00800A	230181701003234	25-Jul-23	2	3.200.000
5	Tripod, Headset, Press Coffee, Coffe Grinder, Coffee Machine dan Mesin Pembuat Es	00910A	230181701003596	01-Aug-23	6	95.100.000
6	<i>Laptop dan Printer</i>	01256A	230181701005523	18-Oct-23	5	92.000.000
7	<i>Televisi, Dekegate, Dispenser, Green Screen dan Lampu Studio</i>	01256A	230181701005523	18-Oct-23	8	75.600.000
8	Pengadaan Peralatan Jaringan	01590	230181701009290	29-Dec-23	4	28.582.500
9	Kursi Relaksasi, Kulkas, Tablet, <i>Televisi, Headphone dan CCTV</i>	01743A	230181701010052	31-Dec-23	10	141.140.000
Jumlah Pembelian					180	4.417.532.500
B. Pengembangan Nilai Aset						
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas PC unit	00382A	230181303005756	11-Apr-23	5	18.315.000
2	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas <i>Hardisk</i>	00500A	230181701001765	10-May-23	10	10.989.000
Jumlah Pengembangan					15	29.304.000
C. Perolehan Lainnya						
1	Pompa Air	BA.12/Setkab/BMN/08/2023		03-Aug-23	1	1.443.000
Jumlah Perolehan Lainnya					1	1.443.000
JUMLAH					196	4.448.279.500

Sedangkan mutasi kurang peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.682.234.012 (BMN Intrakomptabel) berasal dari:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp3.517.186.012 yaitu Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki serta sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Penghentian dimaksud dilakukan sesuai Berita Acara Penghentian Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023**

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.6/Setkab/BMN/04/2023	8	1.896.803.500	-	-	Kendaraan Mobil
2	BA.21/Setkab/BMN/08/2023	17	206.358.820	-	-	PC Unit dan AC Split
3	BA.22/Setkab/BMN/09/2023	205	1.000.122.957	56	26.386.880	Mesin Ketik, Mesin Hitung, <i>Filling Cabinet</i> , LCD Proyektor, Jam Mekanis, Jam Elektronik, AC Split, Dispenser, <i>Coffee Maker</i> , <i>Taperecorder</i> , <i>Headset</i> , <i>Camera Conference</i> , <i>Handy Talkiy</i> , <i>Facsimile</i> , PC unit, Laptop, CPU, Monitor, Printer, Scanner dan External Hardisk
4	BA.24/Setkab/BMN/10/2023	6	186.132.762	-	-	Komputer Jaringan, Switch dan UPS
5	BA.25/Setkab/BMN/10/2023	29	227.767.973	-	-	PC Unit, Printer, Scanner, AC Split, dan Taperecorder
JUMLAH		265	3.517.186.012	56	26.386.880	

2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp165.048.000, yang semula berasal dari Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp198.500.000 berupa laptop, *router*, *amplifier*, kabel, *protective case* dan *notula audio to text*. Berdasarkan memorandum Plt. Inspektur Nomor M.0135/Insp/03/2023, tanggal 28 Maret 2023, *notula audio to text* sebesar Rp165.048.000 seharusnya masuk ke dalam kelompok *software* komputer, sehingga nilai Peralatan Komputer Lainnya yang disajikan menjadi sebesar Rp33.452.000. Koreksi pencatatan nilai kurang tersebut telah ditindaklanjuti melalui Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor: BA.03/Setkab/BMN.04/2023, tanggal 4 April 2023.

Rincian mutasi tambah dan kurang peralatan dan mesin berdasarkan klasifikasi BMN adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023

NO.	ASET TETAP (Peralatan dan Mesin)	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
1	Alat Besar Darat	0	2.350.000	0	2.350.000
2	Alat Bantu	1.131.272.000	1.443.000	0	1.132.715.000
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.842.065.342	0	1.896.803.500	9.945.261.842
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.595.000	21.150.000	0	39.745.000
5	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	0	0	10.725.000
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	0	0	1.170.000
7	Alat Ukur	22.000.000	0	0	22.000.000
8	Alat Kantor	5.838.855.853	39.100.000	153.317.500	5.724.638.353
9	Alat Rumah Tangga	13.512.922.977	303.780.000	96.449.000	13.720.253.977
10	Alat Studio	2.240.414.162	149.290.000	121.560.000	2.268.144.162
11	Alat Komunikasi	700.331.410	0	103.191.037	597.140.373
12	Peralatan Pemancar	5.700.000	0	0	5.700.000
13	Alat Kedokteran	3.400.000	0	0	3.400.000
14	Komputer Unit	11.778.759.524	1.251.159.000	803.313.767	12.226.604.757
15	Peralatan Komputer	9.848.392.785	2.680.007.500	507.599.208	12.020.801.077
	JUMLAH	56.954.604.053	4.448.279.500	3.682.234.012	57.720.649.541

Aset Tetap Lainnya
Rp1.560.950.119

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.560.950.119 dan Rp1.331.598.523. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp737.291.126 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp823.658.993. Aset Tetap Lainnya terdiri atas koleksi perpustakaan, lukisan, serta barang bercorak kesenian. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.331.598.523
Mutasi tambah:	232.226.496
Penyelesaian Pembangunan Langsung	182.433.226
Pembelian	49.793.270
Mutasi kurang:	2.874.900
Koreksi Pencatatan Nilai	2.874.900
Saldo per 31 Desember 2023	1.560.950.119
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.560.950.119

Mutasi tambah aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp232.226.496 berasal dari penyelesaian pembangunan langsung dan pembelian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023

NO.	Nama Barang	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal	Intrakomptabel	
					Vol.	Rp
A. Penyelesaian Pembangunan Langsung						
1	Renovasi Toilet Kantor Setkab	00418A	2301811302012411	26-Apr-23	1 paket	116.089.081
2	Pemasangan Peredam Suara Ruang Relaksasi dan Ruang Konseling	01762A	230181701010275	31-Dec-23	1 Paket	66.344.145
Jumlah Penyelesaian Pembangunan Langsung						182.433.226
B. Pembelian						
1	Pengadaan Buku Perpustakaan	01719A	230181701009781	31-Dec-23	27 Buku	47.793.270
2	Lukisan Tema Alam	01743A	230181701010052	31-Dec-23	2 unit	2.000.000
Jumlah Pembelian						49.793.270
JUMLAH						232.226.496

Sedangkan mutasi kurang atas Aset Tetap Renovasi sebesar Rp2.874.900 berasal dari koreksi kurang berupa 1 (satu) unit pompa air dan 2 (dua) unit *exhaust fan* yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap lainnya dalam renovasi menjadi peralatan dan mesin. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor BA.12/Setkab/BMN/08/2023, tanggal 3 Agustus 2023.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp46.987.145.504)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp46.987.145.504) dan (Rp44.499.422.683). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Alat Besar Darat	2.350.000	(117.500)	2.232.500
2	Alat Bantu	1.132.715.000	(569.612.895)	563.102.105
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	9.945.261.842	(9.676.033.272)	269.228.570
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	39.745.000	(29.170.000)	10.575.000
5	Alat Bengkel Bermesin	10.725.000	(10.725.000)	0
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	1.170.000	(1.170.000)	0
7	Alat Ukur	22.000.000	(11.000.000)	11.000.000
8	Alat Kantor	5.724.638.353	(4.595.718.883)	1.128.919.470
9	Alat Rumah Tangga	13.720.253.977	(10.442.852.698)	3.277.401.279
10	Alat Studio	2.268.144.162	(1.586.211.894)	681.932.268
11	Alat Komunikasi	597.140.373	(576.182.973)	20.957.400
12	Peralatan Pemancar	5.700.000	(3.705.000)	1.995.000
13	Alat kedokteran	3.400.000	(1.700.000)	1.700.000
14	Komputer Unit	12.226.604.757	(9.859.134.598)	2.367.470.159
15	Peralatan Komputer	12.020.801.077	(9.623.810.791)	2.396.990.286
JUMLAH		57.720.649.541	(46.987.145.504,00)	10.733.504.037

C.10 Aset Tak Berwujud (ATB)

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.793.914.807 dan Rp4.632.211.682. ATB pada Sekretariat Kabinet berupa *software* dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai *software* adalah sebesar Rp13.036.302.307, sedangkan nilai lisensi adalah sebesar Rp757.612.500. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Aset Tak Berwujud s.d. 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.632.211.682
Mutasi tambah:	9.161.703.125
Pembelian	8.908.410.125
Pengembangan Nilai Aset	88.245.000
Koreksi Pencatatan	165.048.000
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	13.793.914.807
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023	(6.456.933.073)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.336.981.734

Mutasi tambah ATB sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.161.703.125 berasal dari:

1. Pembelian ATB sebesar Rp8.908.410.125 dan Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp88.245.000 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 32 Rincian Pembelian dan Pengembangan Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023

NO.	Nama Barang	Nomor SPM	Nomor SP2D	Tanggal	Intrakomptabel	
					Vol.	Rp
A. Pembelian						
1	Tools Synchro DMP	00502A	230181303007622	12-May-23	1 unit	2.783.500.000
2	Tools Synchro Data Synchronization dan API Management Platform	00507A	230181302012411	26-Apr-23	2 unit	5.500.000.000
3	Pembangunan Cloud Storage Internal Setkab	01154A	230181701004740	15-Sep-23	2 unit	103.438.125
4	Pengadaan Software SDL- Trados	01238A	230181701005490	17-Oct-23	6 user	49.500.000
5	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT)	01239A	230181701005489	17-Oct-23	1 Paket	96.570.000
6	Aplikasi Informasi Geospasial Arcgis	01361A	230181303023487	17-Nov-23	1 Paket	77.700.000
7	Pengadaan File Enkripsi	01277A	230181701005555	19-Oct-23	10 User	199.800.000
8	Pengembangan Sistem Informasi Layanan Manajemen Kabinet	01504A	230181302043489	08-Dec-23	1 Paket	97.902.000
Jumlah Pembelian						8.908.410.125
B. Pengembangan Nilai Aset						
1	Upgrade Sistem Aplikasi Notulite	01238A	230181701005490	17-Oct-23	2 unit	25.530.000
2	Upgrade Sistem Zimbra NE	01724A	230181701009872	31-Dec-23	1 Paket	62.715.000
Jumlah Pengembangan Nilai Aset						88.245.000
JUMLAH						8.996.655.125

2. Koreksi Pencatatan sebesar Rp165.048.000 yang semula berasal dari Peralatan Komputer Lainnya sebesar Rp198.500.000 berupa laptop, *router*, amplifier, kabel, *protective case* dan *notula audio to text*. Berdasarkan memorandum Plt. Inspektur Nomor M.0135/Insp/03/2023, tanggal 28 Maret 2023, *notula audio to text* sebesar Rp165.048.000 seharusnya masuk ke dalam kelompok *software* komputer, sehingga nilai Peralatan Komputer Lainnya yang disajikan menjadi sebesar Rp33.452.000. Koreksi pencatatan nilai kurang tersebut telah ditindaklanjuti melalui Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor: BA.03/Setkab/BMN.04/2023, tanggal 4 April 2023. Koreksi pencatatan nilai kurang tersebut telah ditindaklanjuti melalui Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor: BA.03/Setkab/BMN.04/2023, tanggal 4 April 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tak Berwujud.

*Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp5.699.184.710*

C.11 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.699.184.710 dan Rp0. Dana yang dibatasi penggunaannya terdiri atas dana di rekening penampungan Kementerian/Lembaga. Dana tersebut muncul karena adanya pencatatan belanja/beban/aset sehubungan dengan belanja menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Rincian dana di rekening penampungan Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2023

No.	Supplier	Pekerjaan	No. SPM	Nilai (Rp)
1	Karya Siber Mandiri	Jasa Security Operation Center	01558A	54.500.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Sewa Layanan SIPT	01560A	153.644.701
3	PT Serasi Autoraya	Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat	01562A	1.647.478.000
4	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Jasa Internet Gedung III dan Sewa Link Metro	01563A	1.655.502.840
5	PT Delta Sinkron Lestari	Sewa Mesin Fotocopy	01564A	97.321.159
6	PT Pakarti Jaya	Sewa Ruangan Kerja	01565A	600.956.553
7	PT Energia Transmedia	Jasa Cleaning Service	01566A	163.035.587
8	PT Indef Eramadani	Jasa Konsultan Dampak Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Nasional dan Ketahanan Pangan Nasional	01583A	813.320.088
9	PT Sinergl Visi Utama	Jasa Konsultan Dampak Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Nasional dan Ketahanan Pangan Nasional	01584A	513.425.782
JUMLAH				5.699.184.710

Aset Lain-Lain Rp0

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp339.889.204. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat/usang dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Kabinet serta dalam proses penghapusan BMN. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas Aset Lain-Lain.

Tabel 34 Mutasi Aset Lain-Lain s.d. 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	339.889.204
Mutasi tambah:	3.517.186.012
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3.517.186.012
Mutasi kurang:	3.857.075.216
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.857.075.216
Nilai per 31 Desember 2023	0

Mutasi tambah Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.517.186.012 berasal dari Penghentian Aset dari Penggunaan yaitu Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki serta sudah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Penghentian dimaksud dilakukan sesuai Berita Acara Penghentian Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35 Rincian Berita Acara Penghentian Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023**

No.	Nomor Berita Acara	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Keterangan
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	
1	BA.6/Setkab/BMN/04/2023	8	1.896.803.500	-	-	Kendaraan Mobil
2	BA.21/Setkab/BMN/08/2023	17	206.358.820	-	-	PC Unit dan AC Split
3	BA.22/Setkab/BMN/09/2023	205	1.000.122.957	56	26.386.880	Mesin Ketik, Mesin Hitung, <i>Filling Cabinet</i> , LCD Proyektor, Jam Mekanis, Jam Elektronik, AC Split, Dispenser, <i>Coffee Maker</i> , <i>Taperecorder</i> , <i>Headset</i> , <i>Camera Conference</i> , <i>Handy Talkiy</i> , <i>Facsimile</i> , PC unit, Laptop, CPU, Monitor, Printer, Scanner dan External Hardisk
4	BA.24/Setkab/BMN/10/2023	6	186.132.762	-	-	Komputer Jaringan, Switch dan UPS
5	BA.25/Setkab/BMN/10/2023	29	227.767.973	-	-	PC Unit, Printer, Scanner, AC Split, dan Taperecorder
JUMLAH		265	3.517.186.012	56	26.386.880	

Sedangkan mutasi kurang Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.857.075.216 merupakan Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin dan persediaan dalam kondisi rusak berat, usang, tidak ekonomis dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, sehingga barang tersebut layak untuk dilakukan usulan pemindahtanganan. Atas usulan pemindahtanganan tersebut dilakukan permohonan izin penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet dengan rincian sebagai berikut:

1. Usulan pemindahtanganan BMN berupa kendaraan dinas bermotor roda empat sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai perolehan Rp1.896.803.500 sesuai dengan surat Deputi Bidang Administrasi Nomor B.358/Adm/06/2023, tanggal 5 Juni 2023, hal Permohonan Izin Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 (empat) pada Sekretariat Kabinet.
2. Usulan pemindahtanganan BMN berupa peralatan dan mesin (intrakomptabel) sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) unit dengan total nilai perolehan Rp1.620.382.512 dan peralatan dan mesin (ekstrakomptabel) sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan total nilai perolehan Rp26.386.880 sesuai dengan surat Kepala Biro Umum Nomor B.1331/Adm-4/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, hal Permohonan Izin Penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Usulan pemindahtanganan BMN berupa peralatan dan mesin sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai perolehan Rp339.889.204 sesuai dengan surat Deputi Bidang Administrasi Nomor B.707/Adm/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023, hal Permohonan Izin Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Kabinet.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp6.456.933.073)

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp6.456.933.073) dan (Rp4.111.765.035). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan/amortisasi, dan nilai buku adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No.	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Software	13.036.302.307	6.084.438.448	6.951.863.859
2	Lisensi	757.612.500	372.494.625	385.117.875
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	0	0	0
JUMLAH		13.793.914.807	6.456.933.073	7.336.981.734

Utang kepada Pihak Ketiga Rp12.496.750.441

C.14 Utang Pada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.496.750.441 dan Rp6.290.278.664. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai utang tersebut berasal dari tunjangan kinerja PNS dan Staf Khusus bulan Desember 2023, kekurangan gaji, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional tunjangan khusus selama tahun 2023, serta pekerjaan pihak ketiga yang menggunakan mekanisme RPATA yang telah selesai namun belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan keuangan TA 2023. Seluruh nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.496.750.441 telah dibayarkan kepada pejabat/pegawai dan penyedia pada bulan Januari 2024. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

No.	Supplier	No. SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
A. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					
1	Kekurangan Tukin November 2023 untuk 2 Pegawai	00024A	240181304000129	09-Jan-24	3.460.205
2	Kekurangan Gaji Bulan November dan Desember Tahun 2023 untuk 2 Pegawai	00025A	240181304000147	09-Jan-24	800.000
3	Kekurangan Gaji Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2023 untuk 1 Pegawai	00026A	240181304000148	09-Jan-24	555.150
4	Susulan Tunjangan Khusus November 2023	00030A	240181303000404	11-Jan-24	18.692.760
5	Kekurangan Tunjangan Khusus Desember 2023 untuk 1 Pegawai	00031A	240181303000403	11-Jan-24	3.963.560
6	Susulan Tunjangan Khusus Desember 2023 untuk 7 Pegawai	00036A	240181303000466	11-Jan-24	116.420.560
7	Tunjangan Kinerja PNS Desember 2023	00038A	240181304000384	17-Jan-24	6.532.457.292
8	Tunjangan Kinerja Staf Khusus Desember 2023	00039A	240181304000369	17-Jan-24	191.450.893
9	Susulan Tunjangan Lainnya Non PNS Desember 2023 untuk 4 Pegawai	00040A	240181304000463	22-Jan-24	91.000.000
Jumlah Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar					6.958.800.420
B. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya					
1	Karya Siber Mandiri	00014A	249991303001387	05-Jan-24	54.500.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	00013A	249991303001335	05-Jan-24	153.644.701
3	PT Serasi Autoraya	00008A	249991303001385	05-Jan-24	1.647.478.000
4	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	00019A	249991303001376	05-Jan-24	1.655.502.840
5	PT Delta Sinkron Lestari	00015A	249991304000601	05-Jan-24	82.121.574
6	PT Pakarti Jaya	00011A	249991303001378	05-Jan-24	593.272.800
7	PT Energia Transmedia	00017A	249991303001386	05-Jan-24	162.633.938
8	PT Indef Eramadani	00007A	249991303000404	04-Jan-24	765.742.823
9	PT Sinergl Visi Utama	00006A	249991304000187	04-Jan-24	423.053.345
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya					5.537.950.021
JUMLAH					12.496.750.441

Uang Muka dari KPPN
Rp800.803.521

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp800.803.521 dan Rp683.175.177. Saldo ini merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp16.349.856.422

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.349.856.422 dan Rp11.754.718.568. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP Lainnya
Rp0*

D.1. Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional pada Sekretariat Kabinet untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Beban Operasional
Rp345.938.107.947*

D.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.938.107.947 dan Rp299.857.038.360 atau mengalami kenaikan 15,37 persen dari beban operasional periode yang sama tahun lalu. Beberapa penyebab kenaikan Beban Operasional antara lain:

1. Kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp39.158.886.895 atau sebesar 21,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai PNS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebanyak 4 orang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebanyak 2 orang, adanya kenaikan jabatan bagi pejabat dan pegawai, serta adanya tunjangan khusus dukungan tugas kepresidenan di lingkungan Sekretariat Kabinet, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berlaku mulai periode September 2023.
2. Kenaikan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4.798.727.984 atau sebesar 6,99 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi pada Dana Operasional Menteri (DOM) untuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, adanya pengadaan jasa konsultan tentang dampak kebijakan pengentasan kemiskinan nasional dan ketahanan pangan, serta adanya penambahan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Kabinet.
3. Kenaikan Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.626.203.652 atau sebesar 31,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan belanja pemeliharaan berupa adanya perbaikan AC sentral, perbaikan APD, perbaikan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, perbaikan

ruang *Air Handling Unit*, pengadaan pemutakhiran layanan IPAM, *Bandwidth Management*, dan *Next Generation Firewall*.

4. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp3.701.112.957 atau sebesar 161,27 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut sehubungan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, studi banding pengelolaan kelembagaan, *benchmarking* sertifikasi kepakaran penerjemah, *workshop Human Resource*, diskusi *developmental disorder*, pendampingan pelaksanaan *English Language and Communication Skill Course for Indonesia Government Translator/Interpreter*, rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan tuberkulosis dan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program peningkatan investasi pada Proyek Prioritas Strategis 2023.
5. Kenaikan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.142.206.356 atau sebesar 32,73 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan pembelian peralatan dan mesin serta aset tak berwujud.

Namun demikian, realisasi penyerapan belanja perjalanan dinas dalam negeri mengalami penurunan sebesar Rp5.370.522.425 atau sebesar 18,40 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut sehubungan dengan optimalisasi anggaran belanja.

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19 dan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 adalah sebesar Rp42.989.262 atau mengalami penurunan sebesar 98,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rincian realisasi Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 dan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 38 Realisasi Beban Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir Pada 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN	2023	2022	%
521131	Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	540.799.883	-100,00
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	705.278.350	-100,00
521841	Beban Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	0	195.005.000	-100,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	42.989.262	1.482.292.179	-97,10
JUMLAH		42.989.262	2.923.375.412	-98,53

Beban Pegawai
Rp220.919.048.573

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp220.919.048.573 dan Rp181.760.161.678 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
5111	Beban Gaji dan Tunjangan PNS	39.572.713.050	39.052.993.153	1,33
5115	Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	59.171.359.802	57.344.225.038	3,19
5122	Beban Lembur	1.581.297.000	726.780.000	117,58
5124	Beban Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	120.593.678.721	84.636.163.487	42,48
JUMLAH BEBAN PEGAWAI		220.919.048.573	181.760.161.678	21,54

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 21,54 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai PNS dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebanyak 4 (empat) orang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebanyak 2 (dua) orang, adanya kenaikan jabatan bagi pejabat dan pegawai, serta adanya tunjangan khusus dukungan tugas kepresidenan di lingkungan Sekretariat Kabinet, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berlaku mulai periode September 2023.

Beban Persediaan
Rp6.265.768.806

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.265.768.806 dan Rp6.241.296.138. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
593111	Beban Persediaan Barang Konsumsi	6.265.768.806	6.241.296.138	0,39
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN		6.265.768.806	6.241.296.138	0,39

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp73.467.529.360 dan Rp68.668.801.376 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember dan 2022

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
5211	Beban Barang Operasional	23.523.971.437	20.709.385.259	13,59
5212	Beban Barang Non Operasional	6.460.074.871	7.402.213.606	-12,73
5221	Beban Jasa	43.483.483.052	40.556.412.511	7,22
5951	Beban Aset Ektrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	790.000	-
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA		73.467.529.360	68.668.801.376	6,99

Berdasarkan tabel di atas, Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 6,99 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan realisasi pada Dana Operasional Menteri (DOM) untuk Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, adanya pengadaan jasa konsultan tentang dampak kebijakan pengentasan kemiskinan nasional dan ketahanan pangan, serta adanya penambahan Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Kabinet.

Dari jumlah realisasi beban barang non operasional pada tabel 41, terdapat realisasi beban untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp42.989.262 yang digunakan untuk pengadaan *Rapid Test*, Swab Antigen dan PCR bagi pejabat/pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan perjalanan dinas serta pengadaan penyemprotan disinfektan ruang kerja Sekretariat Kabinet.

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.782.639.966 dan Rp5.156.436.314 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.044.255.532	1.590.897.928	-34,36
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	104.692.380	68.640.630	52,52
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.068.841.805	2.702.470.016	13,56
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	4.662.000	-	-
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2.387.214.474	556.660.972	328,85
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	172.973.775	237.766.768	-27,25
JUMLAH		6.782.639.966	5.156.436.314	31,54

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan 31,54 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan AC sentral, perbaikan APD, perbaikan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, perbaikan ruang *Air Handling Unit*, pengadaan pemutakhiran layanan IPAM, *Bandwith Management*, dan *Next Generation Firewall*

*Beban Perjalanan Dinas
Rp29.815.155.167*

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.815.155.167 dan Rp31.484.564.635 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Periode Yang Berakhir Pada
31 Desember 2023 dan 2022**

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	12.726.481.678	16.103.093.645	-20,97
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	617.845.000	861.480.000	-28,28
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.322.385.322	1.806.444.000	28,56
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.152.360.729	10.418.577.509	-21,75
524219	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	5.996.082.438	2.294.969.481	161,27
JUMLAH		29.815.155.167	31.484.564.635	-5,30

Berdasarkan tabel di atas, Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan 5,30 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan signifikan beban perjalanan dinas dalam negeri sehubungan dengan optimalisasi anggaran belanja. Namun demikian, pada beban perjalanan dinas luar negeri mengalami peningkatan sehubungan dengan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, studi banding pengelolaan kelembagaan, *benchmarking* sertifikasi kepakaran penerjemah, *workshop*

Human Resource, diskusi *developmental disorder*, pendampingan pelaksanaan *English Language and Communication Skill Course for Indonesia Government Translator/Interpreter*, rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan tuberkulosis dan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program peningkatan investasi pada Proyek Prioritas Strategis 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp8.687.966.075

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.687.966.075 dan Rp6.545.760.719 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.126.694.833	6.246.488.229	-1,92
592115	Beban Amortisasi <i>Software</i>	2.469.047.767	221.330.312	1015,55
592116	Beban Amortisasi Lisensi	92.223.475	72.745.750	26,78
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	5.196.428	-100,00
JUMLAH		8.687.966.075	6.545.760.719	32,73

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan 32,73 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan pembelian peralatan dan mesin serta aset tak berwujud.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp17.500. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	2023	2022	%
594311	Beban Penyisihan Piutang TPA	-	17.500	-
JUMLAH		-	17.500	-

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp887.696.390

D.3 Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp887.696.390 dan Rp1.340.136.599 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	2023	2022	%
Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	736.953.017	1.245.540.652	-40,83
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	33.333.333	66.555.999	-49,92
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		770.286.350	1.312.096.651	-41,29
596111	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2.000.000	29.758.214	-93,28
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.000.000	29.758.214	-93,28
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		768.286.350	1.282.338.437	-40,09
Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	158.406.348	7.074	2239175,49
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	225.478.815	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	192.906.000	5.693.680	3288,07
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		351.312.348	231.179.569	51,97
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	192.906.000	-	-
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	38.996.308	173.381.407	-77,51
Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya		231.902.308	173.381.407	33,75
Jumlah Surplus Kegiatan Operasional Lainnya		119.410.040	57.798.162	106,60
SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		887.696.390	1.340.136.599	(33,76)

Pendapatan Aset Non Lancar Rp770.286.350

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp770.286.350 dan Rp1.312.096.651. Pendapatan tersebut berasal dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 736.953.017 sesuai Risalah Lelang Nomor 668/26/2023, tanggal 3 Agustus 2023 berupa 8 (delapan) unit kendaraan roda empat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000657752 dan NTPN CFDBD8N3EAKEIS6T, tanggal 7 Agustus 2023.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp33.333.333 sesuai sesuai Risalah Lelang Nomor 1196/26/2023, tanggal 4 Desember 2023 berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin dan barang persediaan yang

telah rusak berat. Hasil penjualan lelang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai NTB 000000056112 dan NTPN ECED561QUR95A8MC, tanggal 6 Desember 2023.

*Beban Aset Non Lancar
Rp2.000.000*

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan Rp.29.758.214. Hal tersebut sesuai surat Kepala Biro Umum nomor B.1331/Adm-4/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, hal Permohonan Izin Penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Beban tersebut merupakan nilai buku pada aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang untuk dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan/lelang.

*Pendapatan Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp351.312.348*

D.3.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp351.312.348 dan Rp231.179.569. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp158.406.348 berupa pengembalian belanja tunjangan jabatan struktural PNS TA 2022 dan pengembalian pembulatan gaji PNS TA 2022.
2. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan adalah sebesar Rp192.906.000. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan tersebut sesuai dengan Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.03.1/Setkab/BMN/04/2023, tanggal 6 April 2023, sebesar Rp123.750.000.
 - b. Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.03.2/Setkab/BMN/04/2023, tanggal 6 April 2023, sebesar Rp48.000.000.
 - c. Berita Acara Koreksi Jumlah dan Koreksi Nilai pada Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.28.1/Setkab/BMN/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, sebesar Rp21.156.000.

D.3.4 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp231.902.308 dan Rp173.381.407. Beban dari kegiatan non operasional lainnya tersebut berasal dari:

1. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp192.906.000. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan tersebut sesuai dengan Berita Acara sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.03.1/Setkab/BMN/04/2023, tanggal 6 April 2023, sebesar Rp123.750.000.
 - b. Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.03.2/Setkab/BMN/04/2023, tanggal 6 April 2023, sebesar Rp48.000.000.
 - c. Berita Acara Koreksi Jumlah dan Koreksi Nilai pada Pencatatan Barang Persediaan Nomor: BA.28.1/Setkab/BMN/12/2023, tanggal 13 Desember 2023, sebesar Rp21.156.000.
2. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp38.996.308. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Persediaan Nomor: BA.23/Setkab/BMN/09/2023, tanggal 19 September 2023.

D.4 Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.050.411.557 dan Rp298.516.901.761. Defisit Laporan Operasional berasal dari selisih antara pendapatan operasional sebesar Rp0 dikurangi dengan beban operasional sebesar Rp345.938.107.947 dan ditambah surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp887.696.390.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp11.754.718.568*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.754.718.568 dan Rp26.135.395.890

*Defisit LO
Rp345.050.411.557*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp345.050.411.557 dan Rp298.516.901.761.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan (Rp4.938.012).

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah koreksi nilai aset revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp215.384.482).

Koreksi Lain-lain Rp17.500

E.3.3 Koreksi Lain-Lain

Nilai koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.500 dan Rp87.500. Koreksi tersebut berasal dari koreksi pencatatan beban penyisihan piutang tidak tertagih TPA.

*Transaksi Antar Entitas
Rp349.645.531.911*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp349.645.531.911 dan Rp284.356.459.433 . Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 47 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

Transaksi Antar Entitas	2023	2022
Ditagihkan ke Entitas Lain	350.586.033.180	295.639.314.880
Diterima dari Entitas Lain	(940.501.269)	(1.702.967.941)
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Transfer Keluar	-	(9.579.887.506)
Transfer Masuk	-	-
Jumlah	349.645.531.911	284.356.459.433

DKEL Rp350.586.033.180
DDEL (Rp940.501.269)

- **Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN). Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah DKEL sebesar Rp350.586.033.180 dan jumlah DDEL sebesar (Rp940.501.269).

Ekuitas Akhir
Rp16.349.856.422

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.349.856.422 dan Rp11.754.718.568. Sampai dengan 31 Desember 2023 terjadi kenaikan Ekuitas sebesar Rp4.595.137.854 dari nilai Ekuitas pada 1 Januari 2023 sebesar Rp11.754.718.568.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Barang Milik Negara

F.1 BARANG MILIK NEGARA

1. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat Kabinet melakukan penggunaan sementara atas gedung dan bangunan Gedung III Kementerian Sekretariat Negara yang telah disetujui oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-183/MK.6/KN.5/2019, tanggal 30 April 2019, hal Persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara oleh Sekretariat Kabinet, serta Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Nomor PERJ-05/Kemensetneg/Ses/05/2019 dan Perjanjian Nomor PERJ-

1/Setkab/Adm/05/2019. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menggunakan sementara gedung yang terletak di jalan Ir. H. Juanda No 36 Jakarta Pusat sesuai dengan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Nomor: 11/KSN/S/06/22 dan Perjanjian Nomor: PERJ.02/Setkab/Adm/06/2022.

2. Nilai saldo BMN Ekstrakomptabel yang dimiliki Sekretariat Kabinet per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp244.908.100. Sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat mutasi tambah Rp67.963.780 dan mutasi kurang Rp52.773.760 sehingga nilai perolehannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp260.098.120. Nilai akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp160.771.430 sehingga nilai buku BMN 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp99.326.690. Rincian BMN Ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023

No.	Ekstrakomptabel	Nilai Perolehan Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin							
1	Alat Kantor	26.258.000	7.255.300	350.000	33.163.300	(16.948.260)	16.215.040
2	Alat Rumah Tangga	52.410.000	26.362.600	700.000	78.072.600	(41.669.650)	36.402.950
3	Alat Studio	146.177.500	7.959.000	23.560.000	130.576.500	(86.094.050)	44.482.450
4	Alat Komunikasi	3.807.600	-	1.776.880	2.030.720	(2.030.720)	-
5	Peralatan Komputer	16.255.000	-	-	16.255.000	(14.028.750)	2.226.250
Total Peralatan dan Mesin		244.908.100	41.576.900	26.386.880	260.098.120	(160.771.430)	99.326.690
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan							
1	Alat Kantor	-	350.000	350.000	-	-	-
2	Alat Rumah Tangga	-	700.000	700.000	-	-	-
3	Alat Studio	-	23.560.000	23.560.000	-	-	-
4	Alat Komunikasi	-	1.776.880	1.776.880	-	-	-
Total Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		-	26.386.880	26.386.880	-	-	-
TOTAL		244.908.100	67.963.780	52.773.760	260.098.120	(160.771.430)	99.326.690

Mutasi tambah BMN Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.963.780 terdiri dari:

- Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.500.000 berupa *flipchart*, jam dinding, *headset*, papan tulis, kalkulator, dispenser, *voice recorder* dan teko listrik. Hal tersebut sesuai dengan SPM nomor 00381A, SP2D nomor 230181303005755, tanggal 11 April 2023
- Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.550.000 berupa bingkai foto, jam dinding, *headset*, *voice recorder*, pataka dan tiang. Hal tersebut

sesuai dengan SPM nomor 00801A, SP2D nomor 230181701003235, tanggal 25 Juli 2023.

- c. Koreksi pencatatan sebesar Rp1.431.900 berupa 2 (dua) unit *exhaust fan*. Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor BA.12/Setkab/BMN/08/2023, tanggal 3 Agustus 2023.
- d. Penambahan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp26.386.880 berupa pesawat telepon, *camera conference*, *white board* dan jam mekanis sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dalam kondisi rusak berat yang sebelumnya dicatat peralatan dan mesin. Penambahan dimaksud dilakukan sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan Nomor BA.22/Setkab/BMN.09/2023, tanggal 18 September 2023.
- e. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.055.000 berupa blender, gantungan pakaian, rak partisi, meja bulat, karpet, dan *diffuser*. Hal tersebut sesuai dengan SPM nomor 01744A, SP2D nomor 230181701010053, tanggal 31 Desember 2023.
- f. Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.040.000 berupa alat rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan SPM nomor 01745A, SP2D nomor 230181701010054, tanggal 31 Desember 2023.

Sedangkan mutasi kurang BMN Ekstrakomptabel sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp52.773.760 terdiri dari:

- a. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp26.386.880 berupa pesawat telepon, *camera conference*, *white board* dan jam mekanis sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dalam kondisi rusak berat yang sebelumnya dicatat peralatan dan mesin menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penghentian dimaksud dilakukan sesuai Berita Acara Perubahan Kondisi dan Penghentian Barang Milik Negara dari Penggunaan Nomor BA.22/Setkab/BMN.09/2023 tanggal 18 September 2023.

- b. Usulan pemindahtanganan BMN berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (ekstrakomptabel) sebanyak 56 (lima puluh enam) unit sebesar Rp26.386.880 sesuai dengan surat Kepala Biro Umum Nomor B.1331/Adm-4/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, hal Permohonan Izin Penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Usulan pemindahtanganan BMN tersebut telah disetujui sesuai surat Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet nomor B.711/Adm/10/2023, tanggal 25 Oktober 2023, perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme penjualan secara lelang berupa peralatan dan mesin serta barang persediaan sesuai Risalah Lelang Nomor 1196/26/2023, tanggal 4 Desember 2023.
3. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara satker pemberi kerja-belanja dengan satker penerima kerja-pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Sekretariat Kabinet memiliki transaksi resiprokal pada tahun 2023, dan mencatat transaksi tersebut pada aplikasi SAKTI. Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi MonSAKTI, transaksi resiprokal pada Sekretariat Kabinet tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Transaksi Resiprokal selama Tahun 2023

No	Akun	Uraian	No. SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Satker Penerima	Nama Satker Penerima	Nilai
1	522141	Jasa Penyimpanan Arsip	00045A	230181302002963	14-Feb-23	418929	Pusat Jasa Kearsipan	60.480.000
2	522191	Biaya Program Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli	00696A	230181303011219	26-Jun-23	418934	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	6.790.000
3	521219	Biaya Program Jasa Sertifikasi SDM Kearsipan	01734A	230181701009795	31-Dec-23	450448	Arsip Nasional RI Jakarta	2.800.000
	230181701009795			600.000				
JUMLAH								70.670.000

Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2022 pada bulan Februari sampai dengan Mei 2023. Sekretariat Kabinet telah menindaklanjuti seluruh temuan BPK sesuai dengan Risalah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 pada Sekretariat Kabinet dan Rekapitulasi Hasil Monitoring Tindak Lanjut terhadap

Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet TA 2012 s.d. TA 2022.

Rekening Pemerintah
Rp701.228.314

F.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabinet pada Bank Negara Indonesia 46 Cabang Harmoni dengan nomor rekening 0018306949 dan nama rekening BPG 018 Sekretariat Kabinet telah dilakukan penutupan dan pemindahbukuan menjadi rekening virtual dengan nomor rekening 9890534031121000 dan nama rekening BPG 018 SETKAB. Pemindahbukuan dan penutupan rekening tersebut dilakukan atas dasar surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-269/PB.3/2021, tanggal 19 Februari 2021, hal Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening lingkup Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada Bank BNI. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp701.228.314.

Adapun perubahan rekening Sekretariat Kabinet disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50 Tabel Rekening dan *Virtual Account* Sekretariat Kabinet Tahun 2023

No	Nama Bank	No. Rekening/ No. <i>Virtual Account</i>	Nama Rekening/ Nama <i>Virtual Account</i>	Keterangan		
				Aktif	Tidak Aktif	Surat Ijin Pembukaan/ Surat Pemindahbukuan dan Penutupan
1	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	0018306949	BPP 018 Sekretariat Kabinet		√	S-1463/WPB.12/KP.018/2015, Tgl 17 Apr 2015 S-269/PB.3/2021, Tgl 19 Februari 2021
2	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	374893101	BPP 018 Sekretariat Kabinet		√	S-527/WPB.12/KP.018/2015, Tgl 16 Feb 2015 HMN/070,01/128, Tgl 30 November 2021
3	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121000	BPG 018 SETKAB	√		S-422/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 2 Mar 2020
4	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121001	BPP 018 SETKAB 01	√		S-422/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 2 Mar 2020
5	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121002	BPP 018 SETKAB 02	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
6	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121003	BPP 018 SETKAB 03	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
7	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121004	BPP 018 SETKAB 04	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
8	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121005	BPP 018 SETKAB 05	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
9	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121006	BPP 018 SETKAB 06	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
10	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121007	BPP 018 SETKAB 07	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
11	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121008	BPP 018 SETKAB 08	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020
12	PT. BNI-Cab. BNI Harmoni	9890534031121009	BPP 018 SETKAB 09	√		S-432/WPB.12/KP.01/2020, Tgl 3 Mar 2020



www.setkab.go.id



JL. VETERAN NO 17-18



JAKARTA PUSAT

